

Evaluasi Kelayakan dan Penentuan Pusat Pertumbuhan Kabupaten Caringin sebagai Kabupaten Baru di Provinsi Banten

Feasibility Evaluation and Determination of Caringin District Growth Center as a New District in Banten Province

¹Raden Ruky Apiriandi, ²Ira Safitri Darwin

^{1,2}*Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

Email: ¹radenruky230494@gmail.com, ²pithok.vie@gmail.com

Abstract. Pandeglang Regency as the largest Regency in Banten Province, has been planned and expanded from 2004. The division of Pandeglang Regency into Caringin Regency in 2007 was rejected by the Ministry of Home Affairs based on the results of a study by the University of Indonesia's Independent Faculty of Law. In 2012 the application for pemekaran was carried out again, but in 2013 it was rejected due to a moratorium on the territory. In 2019 the moratorium will be revoked. The author is interested in evaluating the feasibility of Caringin Regency as a new Regency, if the value is better than 2007 and 2013 or not, besides that the author also wants to propose which sub-districts are eligible to be the growth centers of Caringin Regency. This division is motivated by 1) the disparity factor in the northern and southern parts of Pandeglang Regency. 2) Historical factors, where Caringin District was once a "Regentschap Tjiringin" during the Dutch East Indies, 3) Factors of economic potential owned by caringin (tourism, agriculture, animal husbandry, and home industry). Evaluation of the establishment and determination of the growth center of Caringin Regency as a new District in Banten Province uses PP No. 78 of 2007 and theoretical studies and scoring methods are used for the analysis, including in determining the growth center. Evaluation results indicate that Caringin Regency is eligible to become a new district with a total score of 404 (very feasible) up from the results of the 2007 assessment to 344 and the 2013 assessment with a score of 399. The results of the Pandeglang District assessment as an independent district after releasing Caringin District with a score of 425 were assessed able to. Subdistrict which is considered the most appropriate to be the center of growth is Labuan Subdistrict. This feasibility is seen from gravity analysis, accessibility, rank size, scalogram, density of occupation, land built, and weighting of the economy.

Keywords: Evaluation; Appropriateness; Center for Growth; Caringin; New District

Abstrak. Kabupaten Pandeglang sebagai Kabupaten terbesar di Provinsi Banten, telah direncanakan dan dimekarkan dari tahun 2004. Pemekaran Kabupaten Pandeglang menjadi Kabupaten Caringin ditahun 2007 ditolak oleh Depdagri berdasarkan hasil kajian Tim Independen Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tahun 2012 pengajuan pemekaran dilakukan kembali, namun di tahun 2013 ditolak karena adanya moratorium wilayah. Tahun 2019 moratorium Akan dicabut. Penulis tertarik untuk mengevaluasi kelayakan Kabupaten Caringin sebagai Kabupaten baru, apabila nilainya lebih baik dari tahun 2007 dan 2013 atau tidak, selain itu penulis juga ingin mengajukan kecamatan mana yang layak dijadikan pusat pertumbuhan Kabupaten Caringin. Pemekaran ini di latarbelakangi oleh 1) faktor disparitas wilayah bagian utara dan bagian selatan di Kabupaten Pandeglang. 2) Faktor sejarah, dimana Kabupaten Caringin pernah menjadi "Regentschap Tjiringin" pada masa Hindia Belanda, 3) Faktor potensi ekonomi yang dimiliki caringin (pariwisata, pertanian, peternakan, dan home industri). Evaluasi pembentukan dan penentuan pusat pertumbuhan Kabupaten Caringin sebagai Kabupaten baru di Provinsi Banten menggunakan PP No 78 tahun 2007 dan kajian teoritis dan metode skoring digunakan untuk analisisnya, termasuk dalam penentuan pusat pertumbuhan. Hasil evaluasi menunjuk Kabupaten Caringin layak untuk menjadi kabupaten baru dengan total skor 404 (sangat layak) naik dari hasil penilaian tahun 2007 yang menjadi 344 dan penilaian tahun 2013 dengan skor 399. Hasil penilaian Kabupaten Pandeglang sebagai kabupaten mandiri setelah melepas Kabupaten Caringin dengan skor 425 dinilai mampu. Kecamatan yang dinilai paling tepat untuk dijadikan pusat pertumbuhan adalah Kecamatan Labuan. Kelayakan ini dilihat dari analisis gravitasi, aksesibilitas, rank size, skalogram, kepadatan pendudukan, lahan terbangun, dan pembobotan perekonomian.

Kata Kunci : Evaluasi; Kelayakan; Pusat Pertumbuhan; Caringin; Kabupaten Baru

A. Pendahuluan

Pemekaran wilayah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan (Effendi, 2008). Kabupaten Caringin adalah calon wilayah otonom di Provinsi Banten yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Pandeglang. Isu pemekaran wilayah tidak saja terjadi pada saat ini, tapi sudah bergulir dari tahun 2004 yang dituangkan masyarakat dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Forum Komunikasi Desa. Tahun 2007 Provinsi Banten melakukan kajian akademik dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tim Independen Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengeluarkan surat rekomendasi bahwa pembentukan Kabupaten Caringin dinyatakan tidak layak karena 3 (tiga) faktor, yaitu faktor kependudukan dengan bobot 60 (bobot yang diterima 70-100), kemampuan ekonomi dengan bobot 65 (bobot yang diterima 60-75), potensi daerah dengan nilai bobot 54 (bobot yang diterima 60-75), kemampuan keuangan dengan nilai bobot 55 (bobot yang diterima 60-75) (BPP Depdagri, 2007). Wacana pemekaran Kabupaten Pandeglang terus bergulir, tidak berhenti ditahun 2007 saja, terlihat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 135/Kep. 486-Huk-2011 tanggal 13 Mei 2011 tentang persetujuan pembentukan calon Kabupaten Caringin, yang disusul pemberian dana hibah untuk persiapan pembentukan kabupaten baru. Tanggal 29 Oktober 2013 DPR-RI mengajukan usulan pembentukan 65 daerah otonomi baru, mulai dari Pulau Sumatera sampai Papua melalui surat Nomor LG/11230/DPR-RI/X/2013, namun Kabupaten Caringin tidak ada pada usulan tersebut. Tanggal 27 Desember

2013 DPR-RI kembali mengajukan usulan pembentukan 22 (dua puluh dua) Daerah Otonomi Baru (DOB). Didalamnya terdapat 3 calon kabupaten baru di Provinsi Banten, yaitu Kabupaten Caringin, Kabupaten Cibaliung, dan Kabupaten Cilangkahan. Pada tanggal 27 Februari 2014, Presiden membalas surat Ketua DPR-RI perihal 22 Rancangan Undang-undang tentang pembentukan Kabupaten/Kota baru, yang inti suratnya dapat dilakukan setelah pembahasan 65 RUU pada tanggal 23 Oktober 2018 yang lalu

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014, maka pembentukan 65 (enam puluh lima) dan 22 (dua puluh dua) Daerah Otonomi Baru (DOB) ditunda. Keputusan ini diperkuat dengan dikeluarkannya surat memorandum oleh wakil presiden Nomor M-14/Wapres/1/2016 tentang penundaan Pembentukan Daerah Otonomi Baru terkait masalah anggaran (Delly, 2017) Pengajuan Kabupaten Caringin sebagai kabupaten baru di dorong oleh adanya: faktor pertama yaitu disparitas pembangunan di Kabupaten Pandeglang bagian utara dan bagian selatan. Faktor historis, dimana Kabupaten Caringin pernah menjadi "*Regentschap Tjiringin*" pada masa Hindia Belanda yang setingkat dengan kabupaten dan pusat pengembangan Islam di Banten bagian barat. Faktor ketiga yaitu potensi ekonomi yang dimiliki Caringin, diantaranya sektor pariwisata, pertanian dan peternakan (Delly, 2017).

Moratorium pemekaran wilayah yang akan di cabut pada tahun 2019 ini mendorong penulis untuk mengevaluasi kelayakan Kabupaten Caringin sebagai kabupaten baru, apakah sudah layak, masih sama seperti tahun 2007, tahun 2013 atau malah turun tingkat

kelayakannya serta meneliti pusat pertumbuhan Kabupaten Caringin sebagai kabupaten baru dimulai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 dan kajian teoritis.

Tujuan dari studi adalah untuk mengevaluasi kelayakan dan penentuan pusat pertumbuhan Kabupaten Caringin sebagai kabupaten baru di Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2007 dan kajian teoritis.

B. Landasan Teori

Teori terkait yang akan dibahas dalam sub bab ini meliputi teori pengembangan, pemekaran wilayah dan teori pusat pertumbuhan. Pada sub bab ini akan dijelaskan teori tentang pengembangan wilayah dan teori pemekaran wilayah yang satu sama lainnya saling terkait.

Teori Pengembangan Wilayah

Konsep kutub pertumbuhan (*growth pole concept*) dikemukakan oleh Perroux, seorang ahli ekonomi Prancis, Kutub pertumbuhan adalah pusat-pusat dalam arti keruangan yang abstrak, sebagai tempat memancarnya kekuatan-kekuatan sentrifugal dan tertariknya kekuatan-kekuatan sentripetal.

Pembangunan tidak terjadi secara serentak, melainkan muncul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda (Perroux, 1950). Kutub pertumbuhan bukanlah kota atau wilayah, melainkan suatu kegiatan ekonomi yang dinamis. Hubungan kekuatan ekonomi yang dinamis tercipta di dalam dan di antara sektor-sektor ekonomi. Contoh: industri baja di suatu daerah akan menimbulkan kekuatan sentripetal, yaitu menarik kegiatan-kegiatan yang langsung berhubungan dengan pembuatan baja, baik pada penyediaan bahan mentah maupun pasar. Industri tersebut juga

menimbulkan kekuatan sentrifugal, yaitu rangsangan timbulnya kegiatan baru yang tidak berhubungan langsung dengan industri baja.

Dalam teori pengembangan wilayah Friedman, 1966 dijelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) jenjang pusat pertumbuhan, yaitu:

1. Pusat Pertumbuhan Utama (Primer)
2. Pusat utama wilayah berfungsi sebagai penghubung antara pusat-pusat jenjang lebih rendah dengan pusat ekonomi nasional (kota-kota besar).
3. Pusat Pertumbuhan Kedua (Sekunder)
Pusat kedua merupakan penghubung antara daerah perkotaan dengan pedesaan (mengembangkan wilayah yang berada jauh dari pusat utama).
4. Pusat Pertumbuhan Ketiga (Tersier)
Merupakan pusat pelayanan lokal. Pusat ini merupakan lokasi terkecil dalam suatu wilayah.

Teori Pemekaran Wilayah

Dari perspektif kewilayahan, terminologi "pemekaran" menurut Prof. Eko Budiharjo merupakan istilah yang salah kaprah karena dalam pemekaran yang terjadi justru penciutan atau penyempitan wilayah (Kompas, 19 Januari 2008). Hal ini dikarenakan pemekaran yang sering terjadi sekarang ini di Indonesia adalah pemecahan satu daerah otonom ke dalam beberapa daerah otonom, sehingga yang terjadi justru penyempitan wilayah. Pemekaran jarang dipahami sebagai penggabungan dua atau lebih daerah otonom untuk membentuk satu daerah otonom baru. Pemekaran daerah bukan merupakan persoalan yang mudah karena akan menimbulkan persoalan baru dalam penetapan batas-batas wilayah administratif suatu daerah yang

terkena pemekaran tersebut (Saile, 2009).

Ada beberapa makna yang terkandung di dalam istilah pembentukan daerah.

1. Istilah pembentukan daerah lebih tepat dipakai untuk menyebut proses penetapan sebuah daerah bekas satuan administrasi lokal, misalnya penetapan kabupaten dan kotapraja di Jawa tahun 1945 – 1950 menjadi pemerintahan lokal negara baru Indonesia.
2. Istilah Pembentukan Daerah juga dipakai untuk daerah-daerah yang sudah disepakati sebagai wilayah negara RI, tetapi pasca Perang Dunia II diserahkan tentara sekutu kepada kekuasaan Belanda.
3. Istilah Pembentukan Daerah dipakai untuk menyebut satuan pemerintahan daerah RI yang wilayahnya tergabung setelah puluhan tahun berikutnya seperti masuknya Irian Barat dan Timor Timur ke dalam NKRI. Pada masa Orde Lama, pemekaran daerah telah terjadi dalam pemerintahan daerah di Indonesia. Pemekaran daerah pada waktu itu kebanyakan terjadi di luar Pulau Jawa. Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi yang memiliki geografis cukup luas menjadi pertimbangan atas pemekaran daerah. Data pemekaran daerah pada masa Orde Lama

Teori Pusat Pertumbuhan

Teori ini dipelopori oleh Francois Perroux Ahli ekonomi regional bekebangsaan Perancis pada sekitar tahun 1955. Teori Perroux berlandaskan pada Teori Inovasi ciptaan Shcumpeter, dimana Shcumpeter memfokuskan pada peran “Inovasi” (kewiraswastaan) di dalam

meningkatkan pertumbuhan/pembangunan ekonomi.

Konsep *Growth Pole*: berdasarkan fakta dasar perkembangan keruangan (spasial), pertumbuhan tidak terjadi disembarang tempat dan juga tidak terjadi secara serentak; pertumbuhan itu terjadi pada titik-titik atau kutub-kutub perkembangan, dengan intensitas yang berubah-ubah; dan pertumbuhan itu menyebar sepanjang saluran-saluran yang beraneka ragam terhadap keseluruhan perekonomian (Perroux, 1955).

Namun, selain Perroux, terdapat beberapa orang lain yang berusaha untuk mendefinisikan apa itu *Growth Pole*, antara lain:

1. Konsep kutub pertumbuhan regional, yakni sekelompok industri yg mengalami ekspansi yang berlokasi di suatu daerah perkotaan dan mendorong perkembangan kegiatan ekonomi lebih lanjut ke seluruh daerah pengaruhnya (Boudeville, 1966).
2. Suatu pusat pertumbuhan yang terdiri dari suatu kompleks industri yang saling berkaitan dan mendapat keunggulan ekonomi dari keuntungan lokasi (locational proximity) (MCCrone, 1969).
3. *Growth Pole* merupakan suatu pusat kegiatan ekonomi di perkotaan yang mengalami pertumbuhan secara self sustaining, dan sampai suatu titik pertumbuhan itu didorong ke luar daerah pusat terutama ke daerah-daerah yang kurang berkembang (Nichols, 1969), *Growth Pole* adalah suatu pusat pengembangan yang umumnya di representasikan dalam suatu pusat perkotaan dengan dimana variable pertumbuhan yang diukur berdasarkan pada ukuran

populasi yang berupa pertumbuhan penduduk (kesempatan kerja) pada tingkat yg lebih besar dari rata-rata pertumbuhan regional (Parr, 1973),

4. Pusat pengembangan adalah sekelompok industri yg besar yg mempunyai keterkaitan yg kuat melalui hubungan input-output antara leading industry di sekitarnya yang secara geografi membentuk kluster. *Leading industry* mendorong pertumbuhan ke seluruh kelompok, menginovasi, dan tumbuh pada tempat yang lebih cepat daripada industri-industri eksternal ke pusat (Lasuen, 1974)

Terdapat dua pendekatan di dalam Teori *Growth Pole*, antara lain:

1. Secara Fungsional Suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang sifat hubungannya, memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik kedalam maupun keluar (daerah belakangnya)
2. Secara Geografis Suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (*pole of attraction*) yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi didaerah yang bersangkutan dan masyarakat senang datang memanfaatkan fasilitas yang ada.

Menurut Ferroux, *growth pole* lebih menyangkut *economic region* daripada *geographic region*, yang didasarkan pada konsep *Leading/Propulsive Industry*. Pada kutub pertumbuhan, perusahaan-perusahaan pendorong yg besar yg termasuk *leading industries* mendominasi unit-unit ekonomi

lainnya. Suatu *leading industry* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Kaitan-kaitan antar industri yg kuat dg sektor-sektor lainnya. Kaitan ini dapat berbentuk kaitan ke depan (*forward linkage*) dan ke belakang (*backward linkage*).
2. Permintaan terhadap produknya mempunyai elastisitas pendapatan yg tinggi, yg produknya biasanya dijual ke pasar-pasar nasional.

Pusat kota merupakan pusat dari segala kegiatan kota antara lain politik, sosial budaya, ekonomi, dan teknologi. Jika dilihat dari fungsinya, pusat kota merupakan tempat sentral yang bertindak sebagai pusat pelayanan bagi daerahdaerah di belakangnya, mensuplainya dengan barang-barang dan jasa-jasa pelayanan, jasa-jasa ini dapat disusun menurut urutan menaik dan menurun tergantung pada ambang batas barang permintaan. Pusat kota terbagi dalam dua bagian:

1. Bagian paling inti (The Heart of The Area) disebut RBD (Retail Business District) Kegiatan dominan pada bagian ini antara lain department store, smartshop, office building, clubs, hotel, headquarter of economic, civic, political.
2. Bagian diluarnya disebut WBD (Whole Business District) yang ditempati oleh bangunan yang diperuntukkan untuk kegiatan ekonomi dalam jumlah yang besar antara lain pasar dan pergudangan.

Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya suatu pusat pelayanan menurut Ferroux, 1950 adalah:

Faktor Lokasi: Letak suatu wilayah yang strategis menyebabkan suatu wilayah dapat menjadi suatu pusat pelayanan.

1. Faktor Ketersediaan: Sumber Daya Ketersediaan sumber daya dapat menyebabkan suatu wilayah menjadi pusat pelayanan.
2. Kekuatan Aglomerasi: Kekuatan aglomerasi terjadi karena ada sesuatu yang mendorong kegiatan ekonomi sejenis untuk mengelompok pada suatu lokasi karena adanya suatu keuntungan, yang selanjutnya akan menyebabkan timbulnya pusat-pusat kegiatan. Faktor Investasi: Pemerintah Ketiga faktor diatas menyebabkan timbulnya pusat-pusat pelayanan secara ilmiah, sedangkan faktor investasi pemerintah merupakan sesuatu yang sengaja dibuat (Artificial).

C. Hasil Penelitian

Analisa Penentuan Pusat Pertumbuhan berdasarkan teori

Sub bab ini menjelaskan tentang keterkaitan antara Pusat Pertumbuhan wilayah hasil analisis di calon Kabupaten Caringin. Pusat pertumbuhan wilayah dan *hinterland*-nya di calon Kabupaten Caringin. Pusat pertumbuhan ini terbagi menjadi tiga yaitu pusat pertumbuhan utama, pusat pertumbuhan sekunder dan pusat pertumbuhan tersier. Pusat pertumbuhan primer dipegang oleh Kecamatan Labuan dengan fungsi kegiatan ditekankan pada pusat pemerintahan calon Kabupaten Caringin, dan pusat perdagangan dan jasa, pusat pertumbuhan sekunder dipegang Kecamatan Carita, Kecamatan Jiput dan Kecamatan Cikedal akan mempunyai fungsi sebagai pariwisata, pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan. Pusat pertumbuhan tersier yaitu Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Patia

dan Kecamatan Sukaresmi yang akan berfungsi sebagai Pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan.

Analisis Aksesibilitas

Analisis Aksesibilitas bertujuan untuk menentukan daerah yang memiliki aksesibilitas akan menjadi kandidat pusat pertumbuhan. Analisa ini didapat dengan cara menghitung jarak antar kecamatan, kondisi jalan yang terbagi menjadi tiga kriteria, sedang dan buruk dan jumlah penduduk di masing-masing kecamatan.

Hasil perhitungan aksesibilitas calon Kabupaten Caringin, menunjukkan kecamatan yang tertinggi tingkat aksesibilitasnya adalah Kecamatan Labuan dengan nilai 735.781.186. Nilai tersebut dipengaruhi oleh kondisi jalan yang baik, dan tersedia sarana transportasi umum. Sedangkan aksesibilitas yang paling terendah aksesibilitasnya adalah Kecamatan Carita dengan nilai 108.376.082. Nilai aksesibilitas di calon Kabupaten Caringin rendah karena kondisi jalan yang buruk, dan terbatasnya sarana transportasi. Lebih jelasnya hasil analisis aksesibilitas ini dapat dilihat pada Tabel 5.9

Analisis Gravitasi

Analisis gravitasi ini digunakan melihat seberapa besar daya tarik suatu wilayah terhadap wilayah lainnya dan untuk melihat kaitan potensi suatu lokasi dan besarnya wilayah pengaruh dari potensi tersebut.

Hasil analisis gravitasi di Kabupaten Caringin, menunjukkan Kecamatan yang paling besar adalah Kecamatan Labuan dengan nilai 2.114.534.636. Nilai yang paling tinggi di antara Kecamatan – Kecamatan lain dipengaruhi oleh aspek geografis, Kecamatan Labuan cukup strategis karena berada di antara kecamatan-kecamatan lain dan jumlah penduduk yang banyak tinggal di Kecamatan

Tabel 1. Analisis Rank Size

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Log Y (Penduduk)	log X (Rank)	Rank Size
Labuan	56.724	4,754	-	1
Pagelaran	35.279	4,548	0,301	2
Sukaresmi	34.829	4,542	0,477	2
Carita	33.297	4,522	0,602	3
Jiput	31.697	4,501	0,699	3
Cikedal	29.256	4,466	0,778	3
Patia	28.214	4,450	0,845	3

Sumber : Hasil Analisis, 2018

Labuan, jarak antar kecamatan paling dekat dengan kecamatan lainnya, dan kondisi jalan yang baik maupun kondisi jalan sedang. Kecamatan yang daya tarik rendah adalah Kecamatan Patia dengan nilai 292.688.095, Kecamatan Sukaresmi dengan nilai gravitasi sebesar 224.615.859, Kecamatan Carita dengan nilai gravitasi sebesar 273.175.800. Nilai yang tarikan paling rendah dipengaruhi oleh kondisi jalan yang sedang, jarak yang paling jauh di antara kecamatan lainnya, kondisi geografi, jumlah penduduk.

Analisis Rank Size

Analisis rank size ini ditunjukkan untuk menilai besaran suatu wilayah. Indikatornya adalah analisis jumlah penduduk. analisis rank size Kecamatan mana yang penduduknya paling banyak penduduknya terdapat di Kecamatan Labuan dengan jumlah penduduk sebesar 4,754. Nilai yang paling besar dipengaruhi oleh geografi di pinggir laut yang bisa mencari nafkah menjadi nelayan, yang kedua dipengaruhi oleh sejarah pada zaman belanda (regentschap tjiringin), migrasi dari kecamatan yang terdekat. Kecamatan yang nilainya palng kecil adalah Kecamatan Patia dengan perolehan 4,45. Nilai ini dipengaruhi oleh jarak yang jauh dari kecamatan-kecamatan di

Kabupaten Caringin. Berikut dijelaskan pada Tabel 1.

Setelah dilakukan analisis Rank Size di dapatkan 3 tingkat pusat kegiatan masyarakat di Kabupaten Caringin, rank pertama berada di Kecamatan Labuan, rank kedua berada di Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Sukaresmi, kemudian rank ketiga berada di Kecamatan Carita, Kecamatan Jiput, Kecamatan Cikedal dan Kecamatan Patia.

Analisis Skalogram Sarana dan Prasarana

Analisis skalogram merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui kelengkapan sarana yang ada di Kabupaten Caringin. Hasil analisis skalogram Dari 32 jenis fasilitas yang didata, jumlah jenis fasilitas tertinggi yang didalam satu kecamatan adalah sebanyak 26 jenis fasilitas, sementara ang terendah adalah 15 jenis fasilitas. Dengan memperhitungkan selisih antara jumlah fasilitas tertinggi dan fasilitas terendah, maka kecamatan yang ada di calon Kabupaten Caringin dibagi menjadi 3 yaitu Tinggi, Sedang dan Rendah. Kelompok dengan fasilitas tertinggi yang memiliki 26 jenis fasilitas yakni Kecamatan Labuan, Kecamatan Carita, Kecamatan Jiput dan Kecamatan Cikedal. Kelompok dengan fasilitas

terendah memiliki 16 jenis fasilitas yakni Kecamatan Pagelaran, dan Kecamatan Patia. Untuk lebih jelasnya bisa lihat Lampiran.

Analisa Kepadatan Penduduk

warga mata pencahariannya nelayan

Analisis Lahan Terbangun

Analisis lahan terbangun merupakan salah satu variabel yang digunakan buat penentuan pusat

Tabel 2. Analisis Kepadatan Penduduk di Calon Kabupaten Caringin

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas (Ha)	Kepadatan (Jiwa/Ha)	Skor
Pagelaran	36.279	7.930	5	3
Patia	28.214	5.280	5	3
Sukaresmi	34.829	4.680	7	3
Labuan	56.724	1.560	36	1
Carita	33.297	3.650	9	2
Jiput	29.256	5.300	6	3
Cikedal	31.697	2.600	12	2

Sumber : Hasil Analisis, 201

Tabel 3. Analisis Lahan Terbangun di Kabupaten Caringin

Kecamatan	Luas Area (Ha)	Luas Lahan Terbangun (Ha)	% Luas Terbangun Total	Skor
Pagelaran	7.930	2.500	32	3
Patia	5.280	2.200	42	3
Sukaresmi	4.680	2.500	53	2
Labuan	1.560	1.200	77	1
Carita	3.650	2.600	71	1
Jiput	5.300	4.100	77	1
Cikedal	2.600	1.600	62	2

Sumber: Hasil Analisis 2018

Analisa kepadatan penduduk bertujuan menentukan pusat pertumbuhan Kabupaten Caringin. Analisa ini didapat dengan cara menghitung jumlah penduduk di bagi dengan luas daerah setiap kecamatan di Kabupaten Caringin.

Hasil analisis di Tabel 2 dapat dilihat bahwa untuk kepadatan penduduk yang paling tinggi dengan skor 1 yakni Kecamatan Labuan dengan kepadatan penduduk 36 jiwa per Hektar. Kecamatan Labuan mempunyai nilai tertinggi dipengaruhi oleh sejarah zaman pada zaman belanda (regentschap tjiringin), yang kedua adanya pelabuhan perikanan sehingga

pertumbuhan. Hasil analisis bisa dilihat tabel di atas bahwa untuk analisis lahan terbangun yang memiliki nilai paling tertinggi yaitu Kecamatan Labuan mempunyai % luas terbangun total sebesar 77, Kecamatan Carita mempunyai % luas terbangun total sebesar 71, dan Kecamatan Jiput mempunyai % luas terbangun total sebesar 77, sedangkan Kecamatan Sukaresmi, Kecamatan Cikedal mempunyai % (persen) terbangun total 53 dan total 62 dengan rangking 2. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Tabel 3.

Tabel 4. Keterangan Rentang

Skor	Rank Lahan Terbangun	Rentang Lahan Terbangun
1	Tinggi	61,79 - 76,92
2	Sedang	47 -61,79
3	Rendah	15,13 - 47

Analisis Pembobotan Perekonomian**Tabel 5.** Analisis Pembobotan Perekonomian di Calon Kabupaten Caringin

Kecamatan	V1	V2	V3	Total Skor	RANK
Pagelaran	2	3	1	6	3
Patia	3	3	1	7	3
Sukaesmi	3	2	2	7	3
Labuan	1	1	3	5	2
Carita	1	1	1	3	1
Jiput	2	3	2	7	3
Cikedal	2	2	1	5	2

Sumber: Hasil Analisis 2018

Hasil analisis pembobotan perekonomian di calon Kabupaten Caringin, maka dapat dibuat tabel 5.15. analisis pembobotan perekonomian menunjukkan kecamatan mana yang paling besar tarikan dari segi ekonomi dan potensi lokasi perekonomian. Kecamatan Carita merupakan kecamatan yang memiliki potensi ekonomi yang paling baik dibandingkan dengan kecamatan lain kecamatan yang kondisinya baik karena tingkat ekonomi yang maju, sumber daya alam yang menghasilkan dari perdagangan dan jasa, industri dan pariwisata. Kecamatan yang memiliki potensi ekonomi yang tidak baik adalah Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Patia, Kecamatan Sukaesmi, dan Kecamatan Jiput. Kecamatan yang tidak baik karena dilihat dari tingkat ekonomi yang rendah, sumber daya alamnya hanya dari hasil dari pertanian,

Tabel 6. Keterangan Rentang

Skor	Tingkat Ekonomi (V1)	Sumber Daya Alam (V2)	Pra Sejahtera dan Kesejahteraan (V3)	Rank
1	Maju	Perdagangan dan Jasa Pariwisata, Industri	757,67 - 5.835,67	1,3 - 4,3
2	Sedang	Industri Pengolahan, Pertambangan	5.835,67 - 6.593,33	4,3 - 5,7
3	Rendah	Peternakan, Perikanan	6.593,33 - 7.351	5,7 - 7

Analisis Pembobotan perekonomian ini digunakan melihat seberapa besar daya tarik dari segi ekonomi suatu wilayah terhadap wilayah lainnya dan untuk melihat kaitan potensi ekonomi lokasi tersebut. Analisis pembobotan perekonomian ini menggunakan tingkat ekonomi masyarakat di lapangan (observasi), sumber daya alam, dan jumlah keluarga pra sejahtera dan Keluarga Sejahtera ke - 1. Lebih jelasnya bisa dilihat Tabel 5 Data Kondisi perekonomian di Kabupaten Caringin.

perkebunan, dan perikanan.

Analisis Penentuan Pusat Pertumbuhan

Analisis penentuan pusat pertumbuhan ini memiliki 7 (tujuh) variabel yaitu variabel pertama yaitu variabel aksesibilitas, variabel gravitasi, variabel rank size, skalogram sarana dan prasarana, variabel kepadatan penduduk, variabel %lahan terbangun dan variabel ekonomi. Dari hasil analisis penentuan pusat pertumbuhan

Tabel 7. Fungsi Hirarki Kabupaten Caringin

Hirarki	Wilayah Kecamatan	Fungsi
Hirarki 1	Kecamatan Labuan	Pusat Pemerintahan Kabupaten Caringin dan Central Bussines District (CBD) dan pariwisata
Hirarki 2	Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Cikedal	Pariwisata, Pertanian, Pertambangan, dan industri pengolahan
Hirarki 3	Kecamatan Carita, Kecamatan Jiput, Kecamatan Patia, dan Kecamatan Sukaresmi	Pertanian, perkebunan, Industri pengolahan

Sumber: Hasil Analisis Hirarki, 2018

di calon Kabupaten Caringin maka menunjukkan kecamatan yang memiliki hirarki yang tinggi dari hasil pembobotan beberapa variabel. Hirarki 1 yaitu Kecamatan Labuan dengan total nilai 8. Hirarki 2 adalah Kecamatan Carita dengan total nilai 14, Kecamatan Jiput dengan nilai 15 dan Kecamatan Cikedal dengan total nilai 14. Hirarki 3 memiliki 3 kecamatan adalah Kecamatan Pagelaran dengan total nilai 16, Kecamatan Patia dengan total nilai 19 dan Kecamatan Sukaresmi dengan total nilai 19. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat Tabel 5.14 dan Tabel 5.15 Fungsi Hirarki Kabupaten Caringin

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi Kabupaten Caringin di tahun 2019 dinyatakan layak adanya kabupaten baru di Provinsi Banten dengan skor 404. Dengan nilai perolehan faktor sebagai berikut :

1. Faktor kependudukan skor 70,
2. Faktor kemampuan ekonomi skor 60,
3. Faktor potensi daerah skor 71,
4. Faktor kemampuan keuangan skor 65,
5. Faktor Sosial Budaya skor 25,
6. Faktor Sosial Politik skor 19,
7. Faktor Luas Daerah skor 10,
8. Faktor Pertahanan skor 19,

9. Faktor Keamanan skor 25,
 10. Faktor Tingkat Kesejahteraan skor 20,
 11. Faktor Rentang Kendali skor 25, dan
 12. Skor indikator keseluruhan 404
- Skor ini naik diatas hasil penelitian tahun 2007 dengan skor 344, dengan nilai perolehan faktor sebagai berikut:

1. Faktor kependudukan skor 70,
2. Faktor kemampuan ekonomi skor 60,
3. Faktor potensi daerah skor 65,
4. Faktor kemampuan keuangan skor 54,
5. Faktor Sosial Budaya skor 55,
6. Faktor Sosial Politik skor 17,
7. Faktor Luas Daerah skor 16,
8. Faktor Pertahanan skor 25,
9. Faktor Keamanan skor 11,
10. Faktor Tingkat Kesejahteraan skor 23,
11. Faktor Rentang Kendali skor 13, dan
12. Skor indikator keseluruhan 344 dan penelitian tahun 2013 dengan skor 404. Artinya semakin maju Kabupaten Caringin dan Kabupaten Pandeglang sebagai kabupaten yang akan ditinggal dinilai secara mandiri tanpa kecamatan-kecamatan yang menjadi kabupaten

Berdasarkan analisis

penentuan pusat pertumbuhan dengan menggunakan 7 (tujuh) variabel, maka kecamatan yang layak menjadi pusat pemerintahan di masa mendatang adalah Kecamatan Labuan. Hasil analisis Penentuan Pertumbuhan di Kabupaten Caringin didapatkan 3 hirarki diantaranya, hirarki pertama Kecamatan Labuan, hirarki kedua yaitu Kecamatan Carita, Kecamatan Jiput dan Kecamatan Cikedal selanjutnya hirarki ketiga yaitu Kecamatan Pagelaran Kecamatan Patia dan Kecamatan Sukaresmi. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Tabel 6.2 dan Gambar 6.1

Dari Tabel 6.2 di atas, maka pusat pertumbuhan wilayah di calon Kabupaten Caringin terdiri dari pusat pertumbuhan utama di Kecamatan Labuan dengan *hinterland*-nya Kecamatan Carita, Kecamatan Jiput, Kecamatan Cikedal, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Patia dan Kecamatan Sukaresmi. Kecamatan Labuan berfungsi untuk Pusat pemerintahan Kabupaten Caringin dan Central Bussiness District (CBD). Pusat pertumbuhan utama dibantu dengan *hinterland*-Nya dalam menopang perekonomian tersebut dengan mempunyai fungsi yaitu pariwisata, perdagangan dan jasa, pertanian, pertambangan dan industri pengolahan dan hirarki 3 digunakan untuk menopang dua hirarki dan berfungsi untuk pertanian, perkebunan dan industri pengolahan

E. Saran

Setelah di dapatkan hasil dari kesimpulan evaluasi kelayakan dan penentuan pusat pertumbuhan Kabupaten Caringin menjadi Kabupaten baru, maka penulis dapat memberikan beberapa rekomendasi terhadap kajian ini diantaranya:

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang ada di 7 kecamatan Kabupaten Caringin, seperti:

jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas, jenjang sekolah dasar menurut kebutuhan daerah, fasilitas kesehatan yang ada di 7 kecamatan calon Kabupaten Caringin seperti Rumah Sakit, menambah peralatan kesehatan yang ada di puskesmas.

2. Sistem pemerintahan perlu transisi dari Kabupaten Pandeglang ke pemerintah daerah seperti pembangunan kantor pemerintahan yang tersedianya lahan di Kecamatan Labuan, perpindahan sumber daya manusia seperti pegawai negeri sipil, perpindahan alat-alat kantor.
3. Pembangunan jalur bencana alam yang sesuai dengan tata ruang wilayah
4. Setelah di amati lokasi masing-masing kecamatan bahwa Kecamatan Labuan layak menjadi Ibukota Kabupaten Caringin. Kecamatan Labuan yang akan berkembang pada masa mendatang akan berdampak alias penetesan ke bawah daerah lain yang ada di Kabupaten Caringin. Dampak dari perkembangan Kecamatan Labuan menyebabkan daerah lain harus membantu perekonomian di masa yang akan datang seperti Kecamatan Carita yang berpotensi menjadi home industri contohnya *home industri* emping melinjo, industri, perdagangan dan jasa, perikanan. Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Patia akan kena dampak dari berkembangnya Kecamatan Labuan dengan sektor pertanian yang bisa menunjang perekonomian di masa yang akan datang, seperti beras, jagung, ubi, dan palawija

dan sektor peternakan seperti domba, kambing, dan sapi.

Daftar Pustaka

- Departemen Agama RI. Tahun 2011, Al-Quran dan Terjemahnya.
- Ardianto Maksimilianus Gai., Wahyu Hidayat., dkk. 2010. Kajian Kesiapan Maumere menjadi Kota Otonom. *Jurnal Tata Kota dan Daerah* Volume 2 Nomor 1, Juli 2010. Malang. Hal 1-15
- Badan Penelitian dan Pengembangan. Depagri, 2007. *Kajian Pemekaran Wilayah Pandeglang*. Jakarta.
- Berry, Brian J.L. 1964. *Regional Development and Planning United State of America, The Massachusetts Institute of Technology*.
- Darmawan, Syahrial. 2014. *Pembentukan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara*. Thesis. Universitas Hasanudin. Makassar:
- Delly, Massaputro. 2017. *Perjuangan Rakyat Banten Bagian Selatan Menuju Daerah Otonom*. Jakarta: Mer-C Publishing.
- Lembaga Penelitian Unpad, 2007. *Studi Kelayakan Pemekaran Wilayah Kabupaten Cianjur*. Universitas Padjajaran. Bandung:
- Nurzaman. 2012. *Perencanaan Wilayah dalam Konteks Indonesia*. Bandung: ITB.
- Oksap Adhayanto., Handrisal., dan Irman. Kajian Strategis Pemekaran Kecamatan di Daerah Perbatasan (Studi Pemekaran Kecamatan Sugie Besar Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau) *Jurnal Selat*, Volume 29, Nomor 2, Mei 2015. Kepulauan Riau: LPPM Umrah. Hal 472-488
- Parioribo, Yoram. 2013. *Jurnal Studi Kelayakan Pemekaran Kabupaten Napa Swandiwe dari Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua*. (Online) (<http://ejournal.unsrat.ac.id>, 22 mei 2018)
- Puspitasari, Ratty. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembentukan Daerah Baru (Studi Kelayakan Secara Administratif Kabupaten Indagiri Selatan)*. *Jom FISIP Volume 1 Nomor 2*, Oktober 2014 Riau: Universitas Riau.
- Safitri, Ira., Mayzonny hendrick. Penentuan Struktur PKW Kadipaten melalui Pendekatan Analisis Cluster, Skalogram dan Analisis lokasi. *Jurnal Statistik* Volume 14 Nomor 2, November 2014 Hal 77-86
- Subagyo. 2006. *Analisis Kelayakan Pemekaran Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung*. Bandung: Universitas Jenderal Aghmad Yani.
- Sugiyono. 2014. *Metode Kombinasi (mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suwaryo, Utang, Dkk, *Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran. 2018 Studi Kelayakan Pemekaran Wilayah Kabupaten Cianjur*. Cianjur: Pemerintah Kabupaten Cianjur.
- Tarigan (2005) dalam Malik (2006). "Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota". Summary Report

Publikasi Pemerintah :

- Badan Pusat Statistik. 2018. Kabupaten Lebak Dalam Angka 2018. Lebak, Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak
- Badan Pusat Statistik. 2018. Kabupaten Serang Dalam Angka Tahun 2018. Serang Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang

- Badan Pusat Statistik. 2018. Kabupaten Tangerang Dalam Angka Tahun 2018. Tangerang. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang.
- Badan Pusat Statistik. 2012-2018. Kecamatan Carita Dalam Angka 2012-2018 Kecamatan Carita. Pandeglang : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang.
- Badan Pusat Statistik. 2012-2018. Kecamatan Cikedal Dalam Angka 2012-2018 Kecamatan Cikedal Pandeglang : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang.
- Badan Pusat Statistik. 2012-2018. Kecamatan Jiput Dalam Angka 2012-2018 Kecamatan Jiput. Pandeglang : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang.
- Badan Pusat Statistik. 2012-2018. Kecamatan Labuan Dalam Angka 2012-2018 Kecamatan Labuan. Pandeglang : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang.
- Badan Pusat Statistik. 2012-2018. Kecamatan Pagelaran Dalam Angka 2012-2018 Kecamatan Pagelaran. Pandeglang : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang.
- Badan Pusat Statistik. 2012-2018. Kecamatan Patia Dalam Angka 2012-2018 Kecamatan Patia. Pandeglang : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang.
- Badan Pusat Statistik. 2012-2018. Kecamatan Sukaresmi Dalam Angka 2012-2018 Kecamatan Sukaresmi. Pandeglang : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kabupaten Pandeglang Dalam Angka Tahun 2017, Kabupaten Pandeglang. Pandeglang : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang.

Landasan Hukum :

- Republik Indonesia. 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah
- Republik Indonesia. 2011. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten
- Republik Indonesia. 2011. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang
- Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 130/Kep.320- Huk/2007 tanggal 15 November 2007 Tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Cibaliung dan Kabupaten Caringin
- Surat Bupati Pandeglang Nomor 130/238-Tapem/2007, tanggal 16 November 2007 Tentang Usulan Pembentukan Kabupaten Cibaliung dan Kabupaten Caringin, surat usulan ditunjukkan Kepada Gubernur Banten